

BAB II

PERSPEKTIF DALAM EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL, HEGEMONI DAN KRITIK TERHADAP NEOLIBERAL

1.1. Perspektif dalam Ekonomi-Politik Internasional

Dalam ekonomi politik internasional terdapat 3 perspektif. Yang *pertama* adalah perspektif liberal. Menurut perspektif ini ekonomi dunia adalah faktor yang menguntungkan karena pembangunan ekonomi yang interdependensi dan keterkaitan ekonomi maju dengan yang kurang berkembang cenderung berpihak pada masyarakat yang kurang berkembang ini. Melalui perdagangan, bantuan internasional dan penanaman modal asing, ekonomi kurang berkembang mendapatkan pasar ekspor, modal dan teknologi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Ekonomi dunia yang interdependen berdasarkan perdagangan bebas, spesialisasi dan divisi tenaga kerja internasional mendorong pembangunan domestik. Arus barang, modal, teknologi meningkatkan efisiensi secara optimum dalam pengalokasian sumber-sumber daya sehingga meneruskan pertumbuhan dari negara maju ke dalam negara terbelakang (kurang berkembang). Pada titik ini, perdagangan dapat menjadi mesin pertumbuhan.

Teori pertumbuhan ekonomi menganggap bahwa banyak faktor yang diperlukan agar pembangunan ekonomi dapat terdifusi dari negara inti (core) ekonomi dunia yang maju ke negara kurang berkembang di periferi (pinggiran). Laju dan arah dari pengaruh penyebaran ini tergantung dari beberapa faktor²⁵:

1. perpindahan internasional dari faktor-faktor ekonomi (modal, tenaga kerja, pengeluaran)
2. volume, persyaratan dan komposisi dari perdagangan pihak asing
3. mekanisasi dari sistem moneter internasional

²⁵ Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional*, Penerbit Angkasa Bandung, 1995

Satu negara menjadi miskin karena masyarakat pada negara tersebut tidak mampu mentransformasikan diri mereka menjadi kaya melalui adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Mereka tidak membiarkan pasar untuk berkembang tanpa adanya campur tangan politik.²⁶ Kegagalan untuk berkembang adalah karena ketidak-sempurnaan pasar domestik, ekonomi yang tidak efisien dan kekakuan sosial, korupsi politik, struktur sosial dan birokrasi yang parasitis, kegagalan dalam investasi pendidikan dan pertanian yang lepat serta prasyarat pembangunan ekonomi lainnya yang menghambat seperti kebijakan hambatan tarif dan valuta, prasangka urban dan nasionalisme ekonomi. Prasyarat lainnya bagi liberalisme adalah akumulasi modal yang cepat sebagai dasar vital bagi pembangunan.

Perspektif *kedua* adalah Marxisme. Teori Marxian yang melihat pasar sebagai upaya eksploitasi terbuka. Sistem pasar internasional pada dasarnya ada di bawah kendali dari negara-negara maju dan karena itu cara kerjanya menimbulkan kerusakan pada negara-negara berkembang. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya eksploitasi oleh negara-negara maju. Baik eksploitasi dari sisi produksi maupun sisi konsumsi. Pada sisi produksi terjadi eksploitasi terhadap orang yang tidak memiliki aset (alat produksi) yang dalam tatanan masyarakat industrial terjelma menjadi buruh (proletar) sehingga surplus ekonomi lebih banyak disedot oleh kaum kapitalis (pemilik alat produksi). Pada sisi konsumsi terjadi upaya perluasan hegemoni pemilik modal (borjuasi) melalui apa yang disebut fetisisme komoditi. Fetisisme komoditi yang banyak diulas oleh pemikir neo Marxian dan Post Strukturalisme mengatakan bahwa aspek penawaranlah yang kemudian melahirkan permintaan. Prinsip kedaulatan konsumen akan berhadapan dengan upaya terus menerus untuk menarik dan menggoda nafsu konsumtif melalui efek citraan yang muncul dalam iklan

²⁶ Adam Smith, *The Wealth of Nations* dalam Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional*, Angkasa Bandung, 1995

Hubungan antara dua pola tadi, baik pada sisi produksi maupun konsumsi akan menempatkan kaum buruh mengalami eksploitasi terus menerus.

Teori liberal diyakini oleh Marxian tidak akan menghasilkan distribusi yang merata.²⁷ Negara-negara berkembang miskin karena sejarah menempatkan mereka pada posisi subordinat dan kondisi ini bertahan terus sejauh mereka menjadi bagian dari sistem kapitalis internasional itu. Dari hubungan yang tidak merata ini menimbulkan hubungan tukar-menukar (*term of trade*) yang tidak setara karena pasar internasional yang berada dibawah kontrol negara-negara maju saat ini menyebabkan merosotnya harga bahan mentah yang dihasilkan oleh negara-negara berkembang dan meningkalnya harga produk industri yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Selain itu juga perdagangan internasional ini mendorong negara-negara berkembang untuk memusatkan diri pada bentuk produksi yang terbelakang yang sulit akan mendorong terjadinya pembangunan.

Teori Marxian meyakini bahwa investasi asing (dari negara maju) bagi negara-negara berkembang semakin menimbulkan hambatan dan distorsi. Negara-negara asal investasi ini memegang kendali atas industri lokal yang paling dinamis dan mengeruk surplus ekonomi dari sektor ini dengan cara repatriasi keuntungan, royally fees, maupun lisensi-lisensi. Dari sini akan terjadi aliran modal (*capital flight*) ke luar dari negara berkembang ke negara maju. Dari investasi asing ini juga menimbulkan pengangguran karena mereka (negara maju) mendirikan pabrik-pabrik yang padat modal yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, menggusur modal lokal dan pengusaha lokal.

Sisi rekomendasi yang muncul adalah perlunya upaya kesadaran kelas bagi berlangsungnya revolusi sosial yang akan mengantar pada pemilikan alat

I. Wibowo, *Pertarungan Wacana Globalisasi Ekonomi (WEF Vs WSF)*, Harian Kompas, Jumat 5 September, 2003, hal 50

produksi secara merata. Revolusi sosial yang muncul kemudian akan memberikan kewenangan kepada diktator proletariat yang dipercaya menjalankan negara pasca revolusi. Melalui negara inilah kemudian aspek ekonomi politik akan dikelola sehingga tidak heran bila dalam negara-negara sosialis, peranan negaralah yang lebih luas ketimbang pasar.

Dalam hal ini, pada dasarnya pemikiran Marxis sama dengan pemikiran kaum merkantilis yaitu sama-sama mempersoalkan efek kegiatan ekonomi terhadap distribusi pendapatan. Keduanya menganggap bahwa kegiatan ekonomi (dan politik) adalah redistribusi kekayaan dan kekuasaan.

Beberapa asumsi dasar dari kaum Marxis adalah *pertama*, bahwa kelas sosial (kelas transnasional, menurut Neo-Marxis) adalah aktor dominan dalam ekonomi politik dan merupakan unit analisis pokok. Dalam masyarakat kapitalistik, kelas kapitalislah yang menentukan kebijaksanaan publik termasuk kebijakan politik luar negeri. *Kedua*, bahwa kelas-kelas tersebut bertindak berdasar kepentingan materiil kelas mereka masing-masing. *Ketiga*, bahwa basis dari ekonomi kapitalis adalah eksploitasi kelas buruh oleh kelas kapitalis. Analisis Marx mulai dengan teori nilai berdasar tenaga kerja, yang menyatakan bahwa nilai suatu produk ditentukan oleh jumlah tenaga kerja di masa lalu dan masa kini yang dipergunakan untuk menghasilkannya. Marx percaya bahwa di bawah kapitalisme nilai suatu produk bisa dipilah ke dalam tiga komponen; "kapital konstan", yaitu hasil tenaga kerja di masa lalu yang mawujud dalam pabrik dan peralatan atau bahan dasar yang diperlukan untuk menghasilkan barang itu; "kapital variabel" yaitu upah yang dibayarkan untuk tenaga kerja masa kini untuk menghasilkan barang itu; dan "nilai lebih" – yang didefinisikan sebagai keuntungan, rente dan bunga uang yang diambil atau dibayarkan pada kapitalis. Pengambilan nilai lebih oleh kapitalis itu, menurut Marx, membuat buruh tidak bisa memperoleh hasil kerjanya sepenuhnya.

Ketiga, Perspektif Strukturalis. Dengan *level of playing field* yang mengandaikan semua pemain yang ada adalah sama kuat, namun jika hal ini ditarik kedalam kenyataan yang ada, maka akan ditemukan perbedaan. Realitas struktur ekonomi yang ada sekarang ini adalah ketimpangan, dimana terdapat negara-negara yang secara ekonomi kuat dan banyak lemah. Jika *level of playing field* diterapkan seperti yang diinginkan oleh pemikiran liberal, maka negara-negara yang ekonomi lemah tidak akan mampu bersaing dengan negara-negara yang secara ekonomi sudah kuat tersebut. Dalam keadaan lemah ini pemerintah negara itu melakukan intervensi pasar demi melindungi ekonomi domestiknya dari dominasi asing. Membiarkan pasar bebas berlaku, sementara posisi sendiri lemah, hanya akan menghancurkan diri sendiri.

Dengan demikian, bagi kaum strukturalis perdagangan bebas adalah ideologi dari negara yang telah lebih dahulu menjadi kekuatan hegemonik dalam sistem internasional. Ideologi itu dikembangkan oleh negara hegemonik tersebut karena sesuai dengan kepentingan nasionalnya, yaitu mempertahankan atau memperbesar kekuasaannya. Bagi negara yang baru belakangan masuk ke arena persaingan internasional, syarat yang harus dimiliki adalah negara yang aktif dan kuat, bukan negara "*laissez faire*", dan menerapkan kebijakan proteksionis, bukan sistem terbuka.

Teoritisi yang menjadi pendukung strukturalis ini adalah Gunnar Myrdal. Myrdal²⁸ mengatakan bahwa perdagangan internasional yang tidak beraturan dan juga gerakan modal yang bebas akan memperparah ketimpangan internasional. Secara umum teori ini berpendapat bahwa perdagangan internasional yang ada tidak berfungsi sebagai mesin pertumbuhan melainkan tidak lebih sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan yang semakin melebar antara negara-negara maju dengan negara-

²⁸ Gunnar Myrdal, *Asian Drama: An Inquiry into The Poverty of Nations*. New York: Pantheon Books

negara berkembang. Beberapa hal yang menyebabkan melebarnya jurang ini adalah²⁴: pertama, *term of trade* yang merosot terhadap negara berkembang. Kedua, struktur monopoli negara maju dan meningkatnya permintaan akan barang-barang jadi menyebabkan naiknya harga produk industri dari negara-negara maju. Hal ini dilihat sebagai faktor yang memindahkan modal dari negara berkembang ke negara maju (selatan ke utara).

Selain penggambaran yang ada diatas, teori strukturalis juga mengkritisi beberapa aspek dalam perdagangan internasional (kritik ini tidak jauh berbeda dengan kritik teori Marxian). Strukturalis menjelaskan bahwa spesialisasi oleh negara-negara berkembang (selatan) sebenarnya menyebabkan terjadinya *dual economy*, dimana spesialisasi yang dijalankan oleh negara-negara selatan pada ekspor barang-barang yang sudah ketinggalan tidak dapat mendorong perekonomian negara itu, sebaliknya perdagangan menciptakan sektor ekspor yang advanced yang hanya kecil atau malah tidak menimbulkan efek pada ekonomi. Jadi sektor yang diperuntukkan ekspor yang sudah maju dan ekonomi yang pada umumnya belum maju.

Dalam hal penanaman modal asing, teori strukturalis mengalakan bahwa situasi yang berat sebelah. Karena investor asing mengarahkan pada sektor ekspor dan karena itu semakin memperparah *dual economy*.

Dalam hal rekomendasi, kelompok strukturalis ini cenderung ke arah yang lebih moderat (jika dibandingkan dengan rekomendasi Marxian) dalam pandangannya terhadap kapitalis internasional dengan menjelaskan bahwa sistem kapitalis internasional sebenarnya berpeluang untuk dapat direformasi. Karena itu, industrialisasi dapat diubah setelah pasar internasional diubah dan

²⁴ I. Wibowo, *ibid*

industrialisasi itu sendiri akan mempersempit jurang antara negara berkembang (selatan) dengan negara maju (utara).³⁰

Nilai-nilai perdagangan di antara negara-negara industri dan negara-negara pinggiran cenderung secara konstan memburuk, dan ini menguntungkan negara-negara industri maju tetapi merugikan negara pinggiran. Sebagai konsekuensinya, ekonomi pinggiran dipaksa untuk mengekspor bahan makanan dan komoditas dalam jumlah yang makin lama makin besar untuk membiayai impor barang-barang jadi dari negara-negara industri.³¹

Rekomendasi kebijakannya adalah penegakan kebijakan dan peraturan internasional seperti program stabilitas komoditas yang akan melindungi pendapatan ekspor dari negara-negara berkembang. Cara terpenting yang dianjurkan adalah industrialisasi cepal untuk menanggulangi nilai perdagangan yang menurun dari periferi dan untuk menyerap surplus buruh. Ekonomi periferi seharusnya mengejar strategi substitusi impor melalui kebijakan ekonomi proteksionis, didorongnya Penanaman Modal Asing (PMA) dalam perpabrikaan, dan menciptakan pasar bersama diantara negara-negara yang berekonomi lemah atau negara berkembang.³²

Dalam teoritisasi ekonomi politik internasional terdapat juga perspektif realisme. Dalam hal ini, pemikiran Robert Gilpin³³, P. Hirst dan G. Thompson³⁴ dapat dijadikan sebagai representasi dari kaum realis tersebut. Argumentasi Kaum realis pada dasarnya adalah penolakan terhadap tesis globalisasi kaum liberal. Argumentasinya didasarkan pada gambaran empirik yang terjai di tingkat

³⁰ *Ibid*

³¹ Y. Anwar Ikbar, *Op cit*

³² *Ibid*

³³ Robert Gilpin, *The Challenge Of Global Capitalism*, (New Jersey: Princeton University Press 2000)

³⁴ Lihat John Beynon dan David Dunkerley (eds), *Globalization: The Reader*, London, The Athlone Press, 2000.

internasional misalnya Gilpin³⁵ menegaskan bahwa apa yang disebut dengan globalisasi ekonomi tidak menggambarkan realitas yang ada. Hal ini misalnya dapat dilihat dari tingkat penanaman modal asing langsung yang lebih banyak terpusat ketiga wilayah-wilayah dunia seperti Amerika Serikat, Asia Timur dan Eropa Barat, sementara wilayah lainnya sangat lerabaikan dan juga dari fenomena maraknya pembentukan regionalisme ekonomi.

Sementara itu menurut Hirst dan Thompson bahwa yang sesungguhnya kini muncul adalah suatu perekonomian yang lebih menginternasional. Kecenderungan ini bukan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah umat manusia, tetapi hanya merupakan salah satu dari sejumlah sifat perjalanan perekonomian internasional yang telah ada sejak teknologi industri modern mulai dikembangkan pada tahun 1860. Lebih jauh keduanya menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan wujud perekonomian internasional pada kurun waktu 1870 hingga 1914, perekonomian internasional yang ada pada saat ini sesungguhnya kurang terbuka dan terintegrasi dibandingkan dengan rejim internasional yang terbentuk pada kurun waktu 1870 hingga 1914. Lebih jauh keduanya menyatakan bahwa haruslah dilakukan pembedaan antara apa yang disebut dengan internasionalisasi dengan apa yang disebut sebagai tesis globalisasi.³⁶

Tesis ini menggunakan perspektif marxis-strukturalis dalam ekonomi politik internasional untuk mencoba melihat landasan pemikiran apa dibalik konsep ALBA yang didorong oleh Hugo Chavez. Tesis ini tidak menggunakan perspektif dari kaum realis untuk mengidentifikasi landasan pemikiran dibalik gagasan ALBA. karena menurut penulis, argumentasi kaum realisme tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan perspektif Marxis dan Strukturalisme, yaitu pengakuannya terhadap otoritas politik diatas ekonomi. Perspektif

³⁵ Ibid, hal 20-51

³⁶ Op.cit, hal 49-50

strukturalis berkembang sebagai kritik terhadap liberalisme serta sebagai reaksi terhadap meluasnya liberalisme di abad 19. Basis pokok dari tradisi pemikiran ini adalah Marxisme. Jika tradisi pemikiran liberal melihat bahwa pasar memungkinkan maksimalisasi pendapatan individu maka kaum Marxis melihat kapitalisme dan pasar telah menciptakan perbedaan yang ekstrim yaitu kekayaan untuk kaum kapitalis dan kemiskinan untuk kaum buruh. Hasil pertumbuhan ekonomi dalam sistem yang kapitalistik tidak selalu terdistribusi dengan merata. Meskipun dalam sistem ini setiap individu yang ada bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya tetapi para kapitalis jelas lebih mampu untuk meningkatkan pendapatan mereka jauh lebih cepat daripada yang lain. Garis pemikiran ini dengan jelas menolak pendapat bahwa pertukaran yang terjadi antar individu pasti memaksimalkan kemakmuran seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Marxis memandang bahwa kapitalisme adalah sistem yang dalam dirinya mengandung bibit konflik.

1.2. Neo-Liberalisme

Tahun 1937, ketika Komunisme dan Fascisme melanda Eropa, Friedrich August von Hayek, ekonom Austria, menerbitkan "*Economics and Knowledge*", yang menyatakan bahwa kapitalisme pasar bebas bukan sekedar *sosialatausosial construct*, tetapi sebuah mekanisme alami untuk mengelola informasi. Tahun 1944, kembali menerbitkan "*The Road to Serfdom*" yang menuliskan kritik keras dan tajam terhadap sosialisme dan segala bentuk ekonomi perencanaan sentral.³⁷

Dia mengajukan gagasan tentang keunggulan Kapitalisme Pasar Bebas. Menurutny, dengan membiarkan jutaan individu mereaksi secara bebas, maka akan terjadi optimalisasi alokasi modal dan kreativitas manusia serta tenaga kerja, yang tak mungkin dapat ditiru oleh ekonomi perencanaan sentral.

Riky Pratana *Neo-liberalisme*, www.unisosdem.org

Ditahun 1947, Hayek mengadakan konferensi tertutup di Mont Pelerin Swiss. Mereka disatukan oleh keprihatinan atas munculnya gelombang "kolektivisme" yang melanda Eropa. Konferensi itu membuahkan kesepakatan pada pembentukan sebuah kelompok dengan nama The Mont Pelerin Society. Tahun 1950, Hayek hijrah ke Amerika Serikat untuk kemudian bergabung menjadi anggota staf akademis di Universitas Chicago. Pada saat itu, para ekonom di Universitas Chicago seperti Milton Friedman, George Stigler, Gary Becker, sedang gencar-gencarnya mengembangkan pemikiran-pemikiran tentang pasar bebas.

Friedman dikenal sebagai penentang keras tentang campur tangan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, gagasan dari ekonom John. M. Keynes. Menurut Friedman, kebijakan stabilisasi untuk mengontrol inflasi dan pengangguran dengan kebijakan investasi untuk mengungkit belanja masyarakat, justru akan membangkrutkan masyarakat karena itu berarti kontrol pemerintah atas peredaran uang. Menurutnya, kehidupan ekonomi masyarakat akan berlangsung baik jika tanpa campur tangan apapun dari pemerintah, insentif individual adalah pedoman terbaik untuk menggerakkan ekonomi. Tingkat pengangguran tidak seharusnya diatasi dengan campur tangan pemerintah, melainkan cukup diserahkan saja kepada mekanisme pasar kerja yang bebas. Ia juga menyatakan bahwa hanya ada satu tanggung-jawab sosial bisnis, yaitu menggunakan seluruh sumber-dayanya untuk aktivitas yang mengabdikan pada akumulasi laba.

Tahun 1979 Margaret Thatcher terpilih sebagai PM Inggris, dan tahun 1980 Ronald Reagan terpilih sebagai Presiden AS. Kedua tokoh ini sangat antusias memperjuangkan pasar bebas, melakukan privatisasi dan penjualan aset sektor pelayanan publik kepada pihak swasta, serta mengontrakkan sejumlah fungsi negara.

Dibawah kepemimpinan dua tokoh baru ini terjadilah pergeseran prioritas secara jelas, peran pemerintah secara fundamental berubah dengan cepat, meninggalkan komitmen pemerintah dalam *welfare state* dan *full employment* dengan lebih mementingkan pelayanan swasta dibanding publik. Walaupun antara kedua pemimpin ini terdapat beberapa perbedaan, Thatcher memakai moneterisme dengan menekankan control ketat atas *money supply*, sedangkan Reagan memakai *supply-side* dengan memberikan insentif sebesar-besarnya bagi produksi.

Mereka berpendapat bahwa peran pemerintah adalah menyediakan sebuah kerangka dimana rakyat dan masyarakat dapat mengejar tujuan-tujuan mereka, negara tidak untuk menjamin kesejahteraan umum maupun memikul tanggung-jawab untuk memberikan bantuan kepada mereka yang tidak produktif dengan alasan apapun juga. Mereka, serempak melakukan pemotongan alas beban pengeluaran sosial dan tunjangan kesejahteraan, yang menurut mereka telah mengikis insentif ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi.

Di Amerika Serikat, abad baru dimulai dalam periode terpanjang pertumbuhan ekonomi sepanjang sejarah dengan angka pengangguran terkecil sepanjang 30 tahun, sekaligus surplus anggaran untuk pertama kalinya selama 42 tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan USA menikmati pertumbuhan yang sangat luar biasa, dan para CEO dibayar sangat mahal atas jasanya dalam mengawal korporasi-korporasi di masa booming ekonomi. Michael Eisner bos Disney berpendapatan 576 juta USD. Mel Karmazin sebagai bos CBS digaji sebesar 200 juta USD pada tahun 1998. Bangsa AS menyandang gelar sebagai bangsa pedagang saham sehari atau *daytrades*, makin banyak rumah tangga yang berjudi dengan surplus uangnya dan menggantungkan diri pada saham yang dianggap sepertinya bakal akan terus berkembang.

Di Inggris, proporsi penduduk yang memiliki tempat tinggal sendiri melonjak dari sekitar setengah pada tahun 1980 menjadi dua pertiga pada akhir masa kepemimpinan Thatcher. Angka pengangguran berada pada tingkat terendah sejak tahun 1980. Kebanyakan penduduk Inggris memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Membelanjakan lebih dari 56 juta USD untuk berlibur empat hari ke luar negeri menjadi hal biasa bagi penduduk Inggris pada tahun 1998. Dalam satu dekade saja, jumlah pemegang saham telah melonjak melebihi jumlah anggota serikat buruh. Kapitalisme menjadi populer, setiap orang ingin ikut ambil bagian dalam kesuksesan Thatcherisme dalam bidang ekonomi. Mereka yakin bahwa korporasi yang berhasil dan tak terhambat akan membangun jalan menuju Nirwana.

Aliran pemikiran ini berkembang antara tahun 1970-1980an yang diusung oleh Friedrich Von Hayek (1899-1999) yaitu seorang ekonom yang memperoleh nobel ekonomi pada tahun 1974. Neoliberal merupakan anti-tesis dari tradisi pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes atau dikenal dengan Keynesian. Keynesian ini menekankan pada; (i) intervensi pemerintah dalam aktivitas perekonomian, (ii) kebijakan ekonomi yang berorientasi pada *full employment* dan pemerataan.

Asumsi-asumsi dasar dari neoliberalisme adalah; aktor utama kegiatan ekonomi adalah individu. Disini neoliberalisme menekankan perlunya penciptaan pasar yang bebas dari intervensi dari politik (pemerintah). Aturan pasar adalah keterbukaan yang sebesar-besarnya atas perdagangan internasional dan investasi. Pasar diserahkan pada kebebasan gerak modal asing. Jika ini dapat dilakukan maka akan terjadi 2 hal; pertama; perekonomian negara-negara akan maju dengan pertumbuhan yang tinggi akibat masifnya modal yang masuk. Kedua, karena kesaling terkaitan ekonomi domestik dunia akan menjadi aman

dimana karena satu negara tidak akan berperang dengan negara lain karena adanya pola hubungan interdependensi antara mereka.³⁸

Neoliberalisme merupakan basis ideologi paling penting yang memberi legitimasi bagi kapitalisme global dalam tiga dekade terakhir yang memulihkan kekuasaan kelas pemilik modal.³⁹ Secara garis besar neoliberalisme adalah semacam pendekatan ekonomi-politik yang memperjuangkan kesejahteraan umat manusia melalui proses pembebasan individu dari setiap macam kekangan. Kemerdekaan individu dalam hal ini hanya bisa dijamin melalui kerangka kelembagaan yang ditandai dengan pengakuan terhadap hak milik pribadi, pasar bebas dan perdagangan bebas. Negara bertugas menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan yang sesuai untuk itu. Negara, misalnya, harus menjamin kualitas dan integritas uang dengan berbagai fungsinya. Negara juga harus membangun sistem perlawanan, membentuk militer dan polisi dan fungsi-fungsi terkait lainnya untuk mengamankan hak milik pribadi dan menjamin, jika perlu dengan paksa, beroperasinya pasar secara optimal.⁴⁰ Selanjutnya, jika sistem pasar bebas belum terbentuk di sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan maka sistem tersebut perlu segera diadakan, bila perlu melalui regulasi yang dibuat oleh negara.⁴¹

Martinez dan Garcia mengidentifikasi poin-poin pokok neo-Liberal dapat disarikan sebagai berikut:⁴²

1. Aturan Pasar; Membebaskan perusahaan-perusahaan swasta dari seliap keterikatan yang dipaksakan pemerintah. Keterbukaan sebesar-besarnya

³⁸ Milton Friedman dalam I. Wibowo, *Dua Globalisasi*, Harian Kompas, Januari 2004

³⁹ Arthur MacEwan, *Neoliberalism or Democracy? Economic Strategy, Markets, and Its Alternatives for the 21st Century*, Pluto, 1999, dalam Eric Hianej

⁴⁰ Eric Hianej, *Pemulihan Kekuasaan Kelas Dominan dan Politik Neoliberalisme*, Jurnal Politik Internasional GLOBAL, Dept. Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Vol.9 No.2 Desember 2007-1 Mei 2008, hal 126

⁴¹ Ozzay Mehmet, *Westernizing the Third World: The Eurocentricity of Economic Development Theories*, Routledge, 1995

⁴² Elizabeth Martinez dan Arnoldo Garcia, "What is Neo-Liberalism?", *Third World Resurgence* No. 99/1998, hlm. 7-8

atas perdagangan internasional dan investasi. Mengurangi upah buruh lewat pelemahan serikat buruh dan penghapusan hak-hak buruh. Tidak ada lagi kontrol harga. Sepenuhnya kebebasan total dari gerak modal, barang dan jasa.

2. Memotong Pengeluaran Publik dalam Hal Pelayanan Sosial. Ini seperti terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan anggaran untuk 'jaring pengaman' untuk orang miskin, dan sering juga pengurangan anggaran untuk infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, air bersih – ini juga guna mengurangi peran pemerintah. Di lain pihak mereka tidak menentang adanya subsidi dan manfaat pajak (*tax benefits*) untuk kalangan bisnis.
3. Deregulasi; mengurangi peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengurangi keuntungan pengusaha.
4. Privatisasi; menjual BUMN-BUMN di bidang barang dan jasa kepada investor swasta. Termasuk bank-bank, industri strategis, jalan raya, jalan tol, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan juga air minum. Selalu dengan alasan demi efisiensi yang lebih besar, yang nyatanya berakibat pada pemusatan kekayaan ke dalam sedikit orang dan membuat publik membayar lebih banyak.
5. Menghapus Konsep Barang-Barang Publik (*Public Goods*) atau Komunitas. Menggantinya dengan "tanggungjawab individual", yaitu menekan rakyat miskin untuk mencari sendiri solusinya atas tidak tersedianya perawatan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial dan lain-lain; dan menyalahkan mereka atas kemalasannya.

1.3. Hegemoni Neo-Liberal

F.V. Hayek melihat bahwa pertarungan ide sebagai kunci keberhasilan hegemoni neoliberalisme. Menurutnya diperlukan sedikitnya satu generasi sebelum neoliberalisme benar-benar berhasil mengalahkan Marxisme.

Sosialisme, model ekonomi etatis dan model campuran tangan negara ala Keynesian.⁴³ Namun dalam praktiknya, keberhasilan ideologi yang diperjuangkan oleh kelompok seperti *Institute of Economic Affairs* di London dan *Heritage Foundation* di Washington mendominasi dunia setidaknya berutang banyak pada dukungan dana dan politik beberapa orang kaya dan pemimpin-pemimpin korporasi besar yang berpengaruh di Inggris dan Amerika.

Dominasi neoliberalisme juga berutang pada jasa baik elit perbankan di Swedia yang berpengaruh besar dalam pemberian hadiah Nobel kepada Hayek di tahun 1974 dan Friedman di tahun 1976. Hadiah nobel itu sendiri membawa semacam aura superioritas akademik bagi gagasan-gagasan neoliberalisme, yang diantaranya mempermudah dan memperkuat dominasi Milton Friedman di Universitas Chicago.⁴⁴

Namun keberhasilan yang sesungguhnya dari neoliberalisme berkaitan dengan kemampuannya mengkonstruksi semacam "persetujuan politik" yang berasal dari spektrum sosial yang cukup luas yang bisa dimanfaatkan kekuatan-kekuatan politik pendukungnya – terutama partai-partai konservatif pada mulanya – untuk memenangkan pemilu. Persetujuan politik ini membuat neoliberalisme menjadi apa yang disebut Gramsci dengan *common sense*⁴⁵ yang ditempa melalui proses sosialisasi budaya yang memakan waktu lama dan seringkali ditaulkan ke dalam tradisi nasional maupun lokal.⁴⁶ Gramsci mengingatkan *common sense* bertolak belakang dengan *good sense*, bisa dikonstruksikan tanpa sikap kritis terhadap persoalan hidup sehari-hari. Neoliberalisme yang telah menjadi *common sense* karenanya bisa menyesatkan atau menyamarkan persoalan sosial sesungguhnya dibalik kedok-kedok seperti prasangka kultural dan stereotip. Nilai-nilai budaya dan tradisi seperti kepercayaan pada Tuhan,

⁴³ Friedrich von Hayek, *The Constitution of Liberty*, University of Chicago Press, 1978.

⁴⁴ Eric Foner, *op cit*.

⁴⁵ Disini berarti *sense* atau cara berpikir yang diyakini umum.

⁴⁶ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks*, Lawrence and Wishart, 1971.

patriotisme dan pandangan tentang posisi perempuan dalam masyarakat dan ketakutan terhadap komunis, pendatang atau orang asing selalu dengan mudahnya dimobilisasi untuk menutup-nutupi realitas yang sebenarnya. Efek paling penting dari proyek hegemoni semacam ini adalah jargon-jargon neoliberal seperti pasar bebas dan hak milik pribadi diterima sebagai sesuatu yang perlu, dan bahkan alami, bagi proses penataan (kembali) orde sosial. Efek lainnya adalah masalah-masalah mendasar seperti kemiskinan dan kriminalitas tidak lagi dipandang sebagai isu politik dan dinetralkan sebagai persoalan kultural.

Penetrasi ideologi neoliberalisme melalui berbagai saluran: perusahaan, media dan berbagai lembaga yang membentuk arena yang disebut masyarakat sipil seperti universitas, sekolah, lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat dan asosiasi profesional. Yang menarik, neoliberalisme berhasil menancapkan pengaruhnya dengan cara memanipulasi para pengkritiknya dan menggunakan kritik-kritik yang difontarkan terhadap dirinya sebagai basis pembenaran baru bagi kapitalisme. Para pengusung neoliberal selalu menggambarkan neoliberalisme sebagai ideologi yang berorientasi pada kemerdekaan individu. Saat menjadi *common sense*, gambaran ini menciptakan suasana pendapat umum yang mendukung dan menyetujui sistem pasar bebas dan hak milik pribadi sebagai penjamin paling baik kebebasan sipil dan hak-hak asasi manusia. Namun sebetulnya, dalam kurang lebih empat dasawarsa terakhir kemerdekaan individu sebagai idealisme, sebagai nilai penting yang menentukan legitimasi sebuah orde sosial, bukan milik para neoliberalis. Idealisme ini, pada awalnya, dimiliki para aktivis yang kebanyakan adalah mahasiswa seniman, intelektual, sastrawan dan filosof, yang lurun ke jalan kota-kota besar seperti Paris, Berlin, Mexico City, Washington dan Bangkok sejak akhir 1960an.⁴¹ Para aktivis gerakan yang kemudian dikenal dengan "Gerakan 1968" menuntut kemerdekaan

⁴¹ R. Dalton and M. Kuechler (ed.), *Challenging the Political Order: New Social and Political Movements in Western Democracies*, Oxford University Press, 1990

pribadi yang lebih besar dari kendali orang tua, lembaga pendidikan, korporasi, birokrasi dan negara.

Neoliberal yang juga menekankan arti penting kebebasan individu memiliki kekuatan untuk menceraikan libertarianisme, politik identitas dan multikulturalisme dari tema-tema keadilan sosial. Pertama-tama, neoliberalisme memanfaatkan tuntutan kemerdekaan pribadi yang lebih besar untuk melucuti kekuatan semua bentuk aksi kolektif terutama negara dan serikat buruh. Margaret Thatcher misalnya, menolak arti penting *society* yang melebihi arti penting individu dan mempertanyakan apakah *society* sebagai konsep dalam ilmu sosial benar-benar ada dalam dunia empiris, sebagai bagian dari retorikanya saat memangkas habis sisa-sisa negara kesejahteraan peninggalan model ekonomi Keynesian di Inggris.⁴⁸ Langkah berikutnya, kebebasan sipil dan hak asasi manusia yang diperjuangkan begitu banyak orang dalam empat dekade belakangan menjadi sumber inspirasi bagi penciptaan sebuah kultur sosial baru yang berbasis pasar bebas dan menjamin proses akumulasi kapital secara lurus menerus. Untuk itu neoliberal perlu sedikit memelintir gagasan kemerdekaan individu menjadi kebebasan setiap konsumen untuk memilih bukan saja produk yang tersedia di pasar, tapi juga yang lebih penting adalah kemerdekaan memilih gaya hidup, cara-cara berekspresi dan berbagai macam praktik-praktik budaya lainnya.

Dapat diartikan bahwa semua gerakan politik yang berobesesi dengan gagasan kemerdekaan individu dan memandang kebebasan sipil dan hak asasi manusia sebagai sesuatu yang sakral mudah terjatuh ke dalam pelukan neoliberalisme. Karena itu bisa dimengerti jika Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia dengan mudahnya bisa menyusupi negara-negara yang sedang menjalani proses "transisi menuju demokrasi" yang begitu mendambakan

⁴⁸ Ankie Hoogvelt, *Globalization and the Postcolonial World*, John Hopkins University Press, 2001. lihat juga Bob Jessop, *The Future of Capitalist State*, Polity, 2002.

kebebasan dan keterbukaan politik. Mudah juga dipahami bila di kebanyakan negara yang baru dilinggalkan rezim otoriter upaya menegakkan demokrasi²⁴ mengalami proses penyempitan makna menjadi upaya memperjuangkan akuntabilitas publik, menuntut transparansi dan membentuk *good governance*. Inilah konsep yang menjadi produk cara berpikir neoliberal tentang fungsi yang sepatutnya diemban sebuah negara dan demokrasi bagi kepentingan beroperasinya pasar bebas dan perlindungan hak milik pribadi.

Kapitalisme Pasar Bebas dengan memanfaatkan kemajuan dibidang komunikasi dan media telah merebak dengan cepat keseluruh dunia, merambah wilayah-wilayah mulai dari Amerika Latin, Eropa, Asia, hingga seluruh benua Afrika. Ekonomi-politik Neo-Liberalisme semakin diterima secara meluas, dan sejak itu ada beberapa perkembangan yang amat signifikan diantaranya adalah: semakin pesatnya internasionalisasi perdagangan dan finansial, meningkatnya kekuatan perusahaan multinasional atau perusahaan transnasional, semakin kuatnya pengaruh dan peran institusi IMF, WB dan WTO.

Sejumlah negara berkembang setelah melihat *success story* (cerita sukses "macam-macam ekonomi Asia" seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan, serta didorong oleh rasa frustrasi dengan fakta bahwa sedikitnya hasil yang diperoleh dari kebijakan ekonomi tertutup dan substitusi impor, maka mereka mulai membuka pasar domestiknya dan mempraktekkan kapitalisme pasar bebas. Sistem ekonomi Anglo-Amerika, berkat *Washington Consensus* IMF, diwilayah *emerging market* seperti Eropa Timur dan Afrika Selatan, pun disambut dengan hangat.

Sistem ekonomi Sosialisme dan Komunisme di Uni Soviet ambruk, dan telah terbukti gagal dan mengalami kehancuran. Perusahaan-perusahaan negara

²⁴ Konsep demokrasi ini sebenarnya memiliki pengertian yang luas dengan elemen-elemen yang bisa bertentangan satu sama lain

dijual kepada swasta, perdagangan internasional menerobos masuk ke pasar domestik. Sistem ekonomi Sosialisme dan Komunisme dibubarkan, subsidi atas kesejahteraan dibatalkan. Sementara itu, China yang selama kurang lebih 30 tahun menganut sistem ekonomi terencana terpusat, juga mulai mengurangi peran negara. Negara tak lagi memegang monopoli atas produksi barang dan penentuan harga barang dan jasa, perusahaan swasta termasuk swasta asing mulai bermunculan. Subsidi untuk welfare mulai menyusut drastis.

Di wilayah Asia hanya sedikit negara saja yang untuk sepenuhnya menganut konsensus baru tersebut, namun hal ini berdampak fatal bagi negara-negara di kawasan Asia. Menurut para penganjur Neo-Liberal, krisis Asia terjadi adalah akibat intervensi pemerintah yang diluar batas, disamping karena maraknya praktik kapitalisme kroni dan inefisiensi pasar. Kemudian "bantuan" pun diberikan melalui IMF dengan syarat apabila mereka melakukan SAP (*Structural Adjustment Programs*) yang pada dasarnya berisi rekomendasi kebijakan liberalisasi, deregulasi, privatisasi.

Pada periode yang sama, bantuan sebagai salah satu dari instrumen tradisional bagi pembangunan dihapus secara bertahap oleh negara-negara maju. Tahun 1990, volume total investasi langsung atau foreign direct investment senilai 60 milyar USD, sedangkan volume bantuan senilai 20 milyar USD. Pada tahun 1992, volume FDI untuk pertama kalinya mengungguli volume bantuan. Kemudian terus berkembang sehingga pada tahun 1997, volume FDI dinegara-negara berkembang bernilai lebih dari 160 milyar USD, sementara volume bantuan hanya 40 milyar USD.⁵⁰

Menyusuli kesuksesan Neo-Liberalisme, kini bahasa dan pola pikir konsep itu mendominasi pola pikir masyarakat diseluruh pelosok dunia. Munculnya tokoh-tokoh seperti Bill Gates, Jack Welch, Lee Iacocca, Soros, dan sebagainya, sangat dihormati dan dikagumi. Mereka tak hanya dianggap sebagai

Rifky Pratana, op.cit

pahlawan bisnis saja, melainkan juga sebagai pahlawan era baru, sumber resep kesuksesan kehidupan. Dunia bisnis menjadi dunia dambaan dan menampilkan diri sebagai dunia masa depan. Modus dan pola pikir ekonomi yang semula hanya merupakan prinsip didunia bisnis saja, sekarang telah menjadi prinsip bagi seluruh segi kehidupan, baik di segi kehidupan sosial, politik, kultural, bahkan telah menjelma menjadi sebuah religi baru. Religi baru yang amat populer dan digemari ini secara implisit mengajarkan suatu konsep yang menganjurkan manusia untuk sepenuhnya menjadi *homo economicus*. *Homo economicus* dianggap merupakan kodrat manusia yang paling natural dan paling manusiawi, sebab pertama-tama dan terutama manusia beroperasi atas motif ekonomi, sedangkan motif-motif lainnya datang setelah motif ekonomi dan diatur oleh prinsip ekonomi. Maka logika konsep ekonomi-politik Neo-Liberalisme adalah sistem yang paling tepat untuk operasionalisasi konsep kodrali manusia sebagai *homo economicus*.

Konsep *homo economicus* yang diusung oleh Neo-Liberalisme ini sukses merambah keseluruh dunia dan semua lini kehidupan bermasyarakat. Konsep ini diadopsi secara total oleh pola pikir masyarakat diseluruh pelosok dunia, karena keberhasilannya mengidentifikasikan antara Neo-Liberalisme dengan sistem kebutuhan manusia. Di bulan Maret 2002 di Monterrey-Mexico, presiden Amerika Serikat, George W Bush, menegaskan perlunya segera dan secepatnya menggelorakan pasar-bebas dalam rangka National Security Strategy Amerika Serikat yang olehnya dikemas dalam suatu prinsip moral berdasarkan kebebasan. Kapitalisme Laissez-Faire International lampaknya telah meraih kejayaannya, dan menyerahkan perekonomian secara sepenuhnya pada pasar bebas lampaknya memang merupakan pilihan yang paling tepat.

1.4. Kritik Terhadap Neoliberal

Seorang Ahli Ekonomi Universitas Harvard, Dany Rodrik⁵¹ mengungkapkan bahwa pada kenyataannya sepanjang tahun 1990an, sebenarnya tidak terjadi pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang digembargemborkan oleh para pendukung neoliberal. Bukti kuat untuk mendukung pernyataan ini adalah tiga negara yaitu Argentina, Chili dan Uruguay yang mengalami pertumbuhan lebih cepat selama era neoliberal pada tahun 1990an, di banding tingkat pertumbuhan rata-rata dalam catatan sejarah mereka selama era intervensi pasar pada tahun 1950-1980. meskipun demikian, ekonomi Argentina meledak sejak saat itu, dengan efek yang menghancurkan negara tetangganya yang lebih kecil, Uruguay. Ini sebagian besar disebabkan oleh kegagalan kebijakan-kebijakan neoliberalnya.

Di negara industri, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita tahunan mengalami penurunan, dari sekitar 3% selama era intervensi pada tahun 1960an menjadi 2% selama era neoliberal tahun 1980-2000.⁵² Nasib negara berkembang bahkan lebih buruk lagi. Pertumbuhan pendapatan per kapita tahunan mereka rata-rata anjlok dari 3% selama tahun 1960-1980 menjadi 1,5% selama tahun 1980-2000. sebenarnya, tingkat rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product-GDP) per kapita di negara berkembang berada di titik nol selama dua dekade terakhir. Hal paling mengganggu adalah kenyataan bahwa negara berkembang termiskin (negara yang memiliki GDP per kapita dari 375 dolar hingga 1.121 dolar) bergerak dari tingkat sedang 1,9% pertumbuhan GDP per kapita selama era intervensi di tahun 1960-1980an, menurun menjadi 0,5% per tahun selama era neoliberal. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi negara dengan tingkat GDP per kapita berapa pun, menjadi

⁵¹ Dany Rodrik, "After Neoliberalism, What?", makalah yang dipresentasikan di "Alternatives to Neoliberalism", Konferensi koalisi untuk New Rules for Global Finance, 22-23 Mei 2002, Washington DC.

⁵² Weishort M., dalam H.J. Chang & Ilene Grabel, *Membongkar Mitos Neoliberal, Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan* INSIST Press, Januari 2008 hal.14-15

lebih buruk selama era neoliberal dibanding dua dekade sebelumnya. Tingkat pertumbuhan di negara berkembang sekitar dua dekade terakhir ditopang oleh percepatan pertumbuhan ekonomi di dua negara berkembang terbesar, yaitu Cina dan India, negara yang tidak tergolong penganut resep neoliberal. Selama periode neoliberal, ekonomi Amerika Latin sebenarnya telah berhenti tumbuh. Di Amerika Latin dan Karibia, GDP per kapita hanya tumbuh sekitar 7% dalam kurun waktu 1980-2000. Sebagai perbandingan, GDP per kapita untuk Amerika Latin dan Karibia tumbuh mendekali 75% selama periode 1960-1980.

Neoliberalisme lebih mendorong ketidakmerataan dan ketidaksetaraan internasional. Atau dengan kata lain, neoliberalisme tidak mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Hal paling penting adalah arus modal swasta cenderung terkonsentrasi di negara-negara yang telah memiliki siklus pertumbuhan, investasi, dan produktivitas yang baik. Neoliberalisme telah menyebabkan meningkatnya kesenjangan antar negara, sebagian karena konsentrasi arus modal swasta ini. United Nation Development Programme (UNDP) menemukan bahwa pada tahun 1960, negara-negara yang 20% penduduknya merupakan golongan terkaya dari populasi dunia meraup pendapatan 30 kali lipat dibandingkan negara-negara yang 20% penduduknya merupakan golongan termiskin dari populasi dunia. Pada tahun 1980, awal era neoliberal, rasio tersebut mencapai 45:1 dan 59:1 pada tahun 1989, dan mencapai 70:1 pada tahun 1997.⁵³

Di era Neoliberal, kesenjangan antara negara termiskin dengan negara terkaya meningkat hampir dua kali lipat. Perbedaan ini nampak kian jelas jika melihat situasi negara-negara di sub-sahara Afrika. Pada tahun 1960, pendapatan per kapita di negara-negara industri. Pada tahun 1998, pendapatan per kapitanya jatuh hingga selengah dari angka tersebut.⁵⁴

⁵³ UNDP dalam H.J. Chang & Ilene Grabel, *ibid*, hal.17

⁵⁴ UNDP:2001-16 dalam H.J. Chang & Ilene Grabel, *ibid*, hal.18

Hal yang secara khusus perlu dicatat adalah ketidaksetaraan pendapatan tumbuh lebih cepat di negara-negara yang telah sepenuhnya menerapkan konsep neoliberal, seperti Amerika Serikat dan Inggris, dibandingkan negara yang tidak menerapkannya.⁵⁵ Di Inggris, pembagian pendapatan dari 1% teratas mendekati dua kali lipat dari 5,37% sampai 9,57% antara tahun 1979 dan 1998.⁵⁶ Dalam Kajian tentang ekonomi AS, Krugman mengamati bahwa⁵⁷: 1% keluarga di AS memperoleh sekitar 16% dari penghasilan sebelum pajak, dan memiliki sekitar 14% penghasilan sesudah pajak. Pembagian tersebut hampir meningkat dua kali lipat selama 30 tahun terakhir, dan sekarang nyaris sebesar penghasilan 40% jumlah populasi.

Pada wilayah politik, neoliberalisme tidak berkaitan dengan tumbuhnya demokrasi atau transparansi. Beberapa bukti yang dapat diangkat adalah; *pertama*, sistem pasar cocok dengan berbagai macam struktur politik, mulai dari pemerintahan represif hingga demokratis. Sistem pasar tidak serta merta bekerja sebagai bahan perusak dalam rezim otoriter, sebagaimana penegasan kaum neoliberal. *Kedua*, neoliberalisme global mengancam demokrasi dengan menganugerahi para investor dan perusahaan dunia hak veto atas pilihan kebijakan domestik yang mereka tentang. Aspek fundamental pemerintahan demokratis mempersyaratkan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap mereka yang dipengaruhi oleh kebijakan. Namun di bawah payung neoliberalisme, pemilik faktor produksi berskala internasional (khususnya investor besar dan kaum kaya) telah memperoleh "hak veto" yang kian besar atas wilayah politik dan legislatif. Dengan memberi mereka kebebasan menarik dana dari negara yang menerapkan strategi yang dapat mengancam

ibid
⁵⁵ Atkinson A., "Top Incomes in the United Kingdom Over the Twentieth Century", Mimeo, Nuffield College, Oxford, 2002
⁵⁶ Paul Krugman, "for Richer", New York Times, 20 October, 2002

kepentingan mereka, neoliberalisme global secara efektif telah mengikis otonomi kebijakan nasional.⁵⁸

Kekuasaan struktural ini tidak perlu benar-benar dijalankan; investor dan perusahaan besar bahkan hanya perlu mengancam memindahkan modal atau saham, sebagai cara menghentikan inisiatif pemerintah dan rakyat yang tidak mereka senangi. Oleh karena itu pelarian modal oleh investor, atau berupa ancaman semata, menjadi kekuatan perintang bagi kebijakan sosial dan ekonomi yang berkenaan dengan perluasan dan pemerataan, serta kebijakan yang memperjuangkan hak kaum buruh (termasuk hak membentuk serikat buruh dan melakukan penawaran kolektif). Ketiga, frekuensi krisis finansial yang meningkat di bawah neoliberalisme semakin menambah kekuasaan IMF atas pemerintahan nasional. Bantuan IMF datang beserta "syarat terlampir": keputusan penting dalam negeri disetir oleh sebuah institusi yang didominasi AS dan melayani kepentingan komunitas keuangan global. Jadi neoliberalisme mengikis pluralisme dan kemandirian kebijakan di negara-negara berkembang.

Di era dominasi neoliberal ini negara bukan kehilangan batas-batasnya, seperti yang diumumkan dalam globalisasi, tapi yang terjadi adalah menjadikan negara sebagai kaki tangan untuk melegalkan paket kebijakan neoliberal. Segalanya dijalankan dan diawasi dengan sempurna oleh IMF dan World Bank.

"...ketika lembaga-lembaga tersebut didirikan di Bretton Woods pada tahun 1944, mandatnya adalah mencegah konflik di masa depan dengan memberi pinjaman bagi rekonstruksi dan pembangunan, serta (untuk sementara) mengatasi masalah-masalah dalam neraca pembayaran. Mereka tak memiliki mandat orang-orang pemerintahan yang membuat keputusan ekonomi, termasuk tak memberikan izin untuk campur tangan dalam kebijakan nasional".⁵⁹

⁵⁸ DeMartino G.A., 'Global Neoliberalism. Policy, Autonomy, and International Competitive Dynamics', *Journal of Economic Issues* 33, 1999.

⁵⁹ Anup Shah, *Keuntungan utama Globalisasi*, Jurnal Satu Bumi The Institute for Global Justice, 2004 hal 5-6

Fidel Castro meyakini bahwa perekonomian global semakin memburuk dalam era hegemoni neoliberalisme;

"memburuknya situasi sosial di negara-negara Dunia Ketiga merupakan salah satu manifestasi gampang globalisasi neoliberal. Penerapan kebijakan penyesuaian (Program-program Penyesuaian Struktural), krisis finansial, memberikan dampak negatif yang sangat mendalam terhadap realitas sosial negeri-negeri berkembang dan meningkatnya instabilitas yang disebabkan oleh proses globalisasi.

Kemerosotan pendapatan merupakan karakter utama yang menjadi kepedulian model-model sosio ekonomi saat ini. Berdasarkan data PBB, pada tahun 1960, 20% penduduk dunia yang hidup di negara-negara terkaya berpendapatan 30 kali pendapatan 20% penduduk termiskinya. Pada tahun 1997, jumlahnya meningkat menjadi 74 kali lipat. Antara tahun 1994 dan 1998 kekayaan 200 orang terkaya di dunia meningkat dari 440 milyar dolar AS menjadi lebih dari 1 trilyun dolar AS. Lebih jauh lagi, pada periode yang sama, harta kekayaan 3 orang terkaya dunia lebih besar dari jumlah keseluruhan GDP 249 negara-negara berkembang.⁶⁰

Di Amerika Latin ketidak berhasilan proyek neoliberalisme dalam era globalisasi menyebabkan kemiskinan, ketidak-adilan, disparitas kaya dan miskin, dan tentu saja berbagai bentuk kekerasan yang terjadi sehari-harinya. Proyek-proyek ini disponsori oleh Amerika Serikat dan lembaga-lembaga finansial seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Bank Pembangunan Antar-Amerika (*Inter-American Development Bank*). Dibandingkan dengan wilayah dunia lainnya, Amerika Latin sejak 1980an sudah menjadi laboratorium dari eksperimen neoliberalisme.⁶¹ Jendral Pinochet pada saat berkuasa sudah

⁶⁰ Fidel Castro Ruz, *Situasi Sosial di negeri-negeri Dunia Ketiga*. (terjemahan). Pidato yang disampaikan pada Konferensi Tingkat Tinggi pemimpin-Pemimpin Negara Selatan yang terjaung dalam kelompok 77, Havana, 12 April 2000, dalam Soyomukti N.

⁶¹ Nur Iman Subono, *Jalan "Kiri" Amerika Latin Memasuki Era Baru?*, dalam Nurani Soyomukti, *Hugo Chavez Vs Amerika Serikat*, Garasi, 2008.

menjalankan formula yang diajukan oleh *Chicago School* (Milton Friedman) yang sebenarnya adalah proyek neoliberalisme.

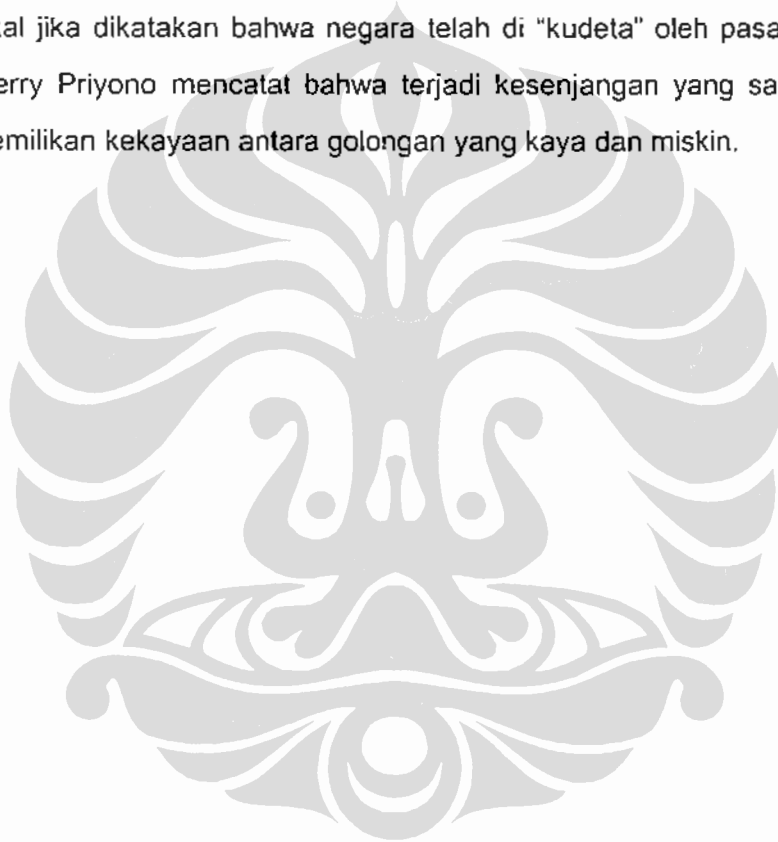
Pada awalnya masyarakat Amerika Latin memang memiliki harapan atas dampak keuntungan dari proyek neoliberalisme. Tapi setelah dari 20 tahun, masyarakat negara-negara Amerika Latin kelihatannya mengalami kekecewaan karena kinerja neoliberalisme tidak sesuai dengan janjinya ketika dicanangkan. Seperti kita ketahui bahwa kebijakan ekonomi yang dijalankan atas dasar *Washington Consensus* adalah pembangunan yang dihela oleh modal asing, ditarik oleh privatisasi di sektor industri dan sumber alam, liberalisasi impor, tingkat suku bunga yang tinggi, pengetatan fiskal, dan dalam banyak kasus, mata uang yang dipatok. Setelah masa-masa euforia pada akhir 1980an dan awal 1990an, krisis mulai muncul ke permukaan. Impor mengalami sentakan pada saat biaya tarif dipotong, nilai mata uang yang tinggi menyulitkan ekspor, defisit neraca pembayaran dan peningkatan pembayaran utang luar negeri. Semua ini pada akhirnya mendorong resesi, pengangguran dan ketidakmerataan yang semakin memburuk. Tidak mengherankan apabila masyarakat Amerika Latin saat ini lebih banyak bekerja di sektor-sektor informal. Pada pertengahan 1990an, tingkat suku bunga AS meningkat, dan ini menyebabkan beban utang luar negeri yang semakin parah, dan pada gilirannya fundamental ekonomi negara-negara Amerika Latin ambruk. Misalnya Meksiko (1994), Brazil (1999) dan Argentina (2001).⁶²

Dengan menguatnya pasar bebas terutama dalam bidang pasar finansial menyebabkan terjadinya satu tata moneter dunia yang disebut oleh Susan Strange sebagai "casino" atau sebuah rumah judi:

⁶² Susan Ekchstein, *Globalization and Mobilization in the Neoliberal Era in Latin America*, Boston University. Dan Caludio Kats, "Latin America. New Economic Turbulance", *Excritos Politicos y Economicos*, IV, May, 2001

"Sistem finansial Barat itu semakin lama semakin mirip dengan sebuah casino raksasa. Setiap hari permainan judi diselenggarakan dalam kasino itu dengan melibatkan begitu banyak uang sehingga tak terbayangkan. . . . Ini ternyata menimbulkan konsekwensi yang sangat serius"⁶³

Para pemain kuat di dalam sistem pasar adalah para pemilik modal internasional. Dengan sistem pasar yang kuat seperti ini, adalah hal yang masuk akal jika dikatakan bahwa negara telah di "kudeta" oleh pasar⁶⁴ Sementara itu, Herry Priyono mencatat bahwa terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilikan kekayaan antara golongan yang kaya dan miskin.



⁶³ Susan Strange, *Casino Capitalism*, London, Blackwell, 1986

⁶⁴ Saleh Abdullah, *Ketika Negara di Kudeta Pasar*, Jurnal Wacana, INSIST, Edisi 19 Tahun VI 2005